



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2020**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN**

PURWODADI 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam era reformasi saat ini penyelenggaraan negara dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya sehingga dapat diketahui kinerja yang dicapai. Hal ini dimaksud untuk mengetahui kegiatan-kegiatan mana yang sudah dapat dilaksanakan sesuai rencana dan kegiatan mana yang masih harus dilakukan perbaikan-perbaikan khususnya pada kegiatan tahun-tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020. ini masih belum sempurna, hal ini semata-mata disebabkan karena keterbatasan kemampuan dalam penyajian data dan analisa. Oleh karena itu kepada Ibu BUPATI GROBOGAN untuk dapat memakluminya serta mohon koreksi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, Pebruari 2021
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN

PRADANA SETYAWAN, S.Pt, MP
NIP. 19760626 200501 1 011

DAFTAR ISI

	Halama
	n
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Gambaran Umum	1
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
I.3 Sumber Daya Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5
I.4 Permasalahan Utama / Isu Strategis Perangkat Daerah	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
II.1 Rencana Strategis Dinas Tahun 2016-2021	8
II.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	8
II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	10
II.5 Rencana Anggaran Disperindag Tahun 2020	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	12
III.2 Analisis Capaian Kinerja	16
III.3 Realisasi Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	28
LAMPIRAN :	
1. PERJANJIAN KINERJA	
2. STRUKTUR ORGANISASI	
3. SK TIM PENYUSUN	
4. TABEL EVALUASI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR	

URUSAN RPJMD

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (**Good Governance**) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparaturnya pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021.

Laporan Akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tentang perindustrian dan perdagangan di wilayah Kabupaten Grobogan pada periode tahun anggaran 2020. Laporan ini juga sekaligus merupakan bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun anggaran 2020.

Rincian capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan berdasarkan masing-masing sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2020
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	3,35%	16,5%	3,40%	13,31%
2	Pertumbuhan Industri (%)	1,32%	1,27%	1,33%	0,78%
3	Cakupan pembinaan unit Usaha IKM (%)	1,90%	25%	2,00%	2,22%
4	Persentase industri kecil dan menengah (%)	99,96%	38,4%	99,97%	99,93%
5	Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk (%)	0,19%	75%	0,19%	0,59%
6	Persentase industri yang telah	88,23%	47%	94,12%	62,5%

	memenuhi standar kelayakan produksi (%)				
7	Persentase sentra industri yang berkembang (%)	87,59%	40%	88,69%	49,12%
8	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM (%)	16,56%	20%	16,59%	16,70%
9	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan (%)	56,25%	70%	62,50%	75%
10	Perkembangan nilai ekspor (Rp)	Rp.144.173.475.000	Rp.52.529.470.096	Rp.144.894.341.000	Rp.1.226.949.568.429
11	Persentase Pasar yang diawasi (%)	15,80%	100%	16,00%	100%
12	Tingkat pengaduan yang ditangani (%)	87%	100%	90%	90%
13	Produk yang bisa diterima pasar internasional (bh)	4 bh	5 bh	4 bh	5 bh
14	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	22,55%	19,68%	23,12%	20,09%
15	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal (%)	24%	85%	28%	90%
16	Persentase lokasi PKL yang tertata (%)	30%	75%	45%	75%

Dari semua Capaian Sasaran (Outcome) yang ada, semua kegiatan telah mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan masih terdapat target kinerja yang belum sepenuhnya tercapai 100%. Belum tercapainya sasaran tersebut tentunya perlu dikaji dan dianalisa agar kita dapat melakukan perbaikan – perbaikan di masa mendatang.

Demikian ringkasan eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 GAMBARAN UMUM

Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan dan pasar daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
2. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
3. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang sosial;
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
5. Pengelolaan Kesekretariatan dinas;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Grobogan, maka tugas pokok dan fungsi unsur – unsur Dinas yang bertanggung jawab dalam hal adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Dinas melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
- b. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Sosial;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
- e. Pengelolaan Kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administrative dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;

- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan energi sumber daya mineral, perdagangan, dan pasar daerah;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat- menyurat;
- d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub bagian Umum.

3. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral

Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Perindustria, Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha industri dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM); dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu oleh Seksi Agro Industri, Seksi Non Agro Industri, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Seksi Informasi Industri.

4. Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Perdagangan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perdagangan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh Seksi Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi, Seksi Pengembangan, Promosi dan Sarana Perdagangan, dan Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.

5. Bidang Pasar Daerah

Kepala Bidang Pasar Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Kepala Bidang Pasar Daerah melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar daerah;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Pasar Daerah dibantu oleh Seksi Restribusi Daerah, Seksi Bina Pasar, dan Seksi Sarana dan Prasarana Pasar Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Sekretaris, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,
 - b. Kepala Sub Bagian Umum;
3. Kepala Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Agro Industri,
 - b. Kepala Seksi Non Agro Industri, Energi dan Sumber Daya Mineral,
 - c. Kepala Seksi Informasi Industri;
4. Kepala Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi,
 - b. Kepala Seksi Pengembangan, Promosi dan Sarana Perdagangan,
 - c. Kepala Seksi Bina Usaha dan Pemasaran;
5. Kepala Bidang Pasar Daerah, membawahkan:

- a. Kepala Seksi Retribusi Daerah,
 - b. Kepala Seksi Bina Pasar,
 - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar Daerah; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

I.3 SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kondisi aparatur atau pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan menurut jenisnya dapat dibedakan dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat, golongan, eselon serta pendidikan formal per 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
KUALIFIKASI PEGAWAI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3
1.	Pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan	
	a. SD	1
	b. SMP	7
	c. SMA	23
	d. Sarjana Muda (DI – DIII)	-
	e. S1 dan D IV	22
	f. S2	9
	Jumlah	62
2.	Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan	
	a. Golongan I	3
	b. Golongan II	25
	c. Golongan III	29
	d. Golongan IV	5
	Jumlah	62
3	Pegawai berdasarkan Jabatan	
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	4
	c. Eselon IV	16
	d. Eselon V	-
	e. Staf	39
	Jumlah	60
4	Pejabat Fungsional	2
	Jumlah	2

I.4 PERMASALAHAN UTAMA / ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1.4.1 SEKRETARIAT

1. Rendahnya SDM aparatur secara kuantitas maupun kualitas.
2. Kurangnya sarana prasarana perkantoran.

1.4.2 BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Masih sedikitnya jumlah industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi (SNI, ISO dan lain), masih terdapat 26,5% industri yang belum berstandar kelayakan produksi.
2. Masih rendahnya klaster industri yang berkembang, jumlah klaster yang berkembang baru mencapai 7 unit.
3. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar.
4. Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri.
5. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan mesin.
6. Belum meratanya kapasitas dan ketrampilan SDM industri kecil terkait dengan penguasaan teknologi industri.
7. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal.
8. Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki ijin usaha. Jumlah industri yang memiliki ijin usaha baru mencapai 50,6%.
9. Belum seluruh rumah tangga memperoleh pelayanan listrik tahun 2015 baru sebesar 84,92%
10. Masih tingginya pertambangan yang tidak memiliki izin, tahun 2015 sebesar 53,92%.

1.4.3 BIDANG PERDAGANGAN

1. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan produk makanan yang telah kadaluwarsa.

2. Masih terbatasnya volume dan nilai realisasi ekspor. Hal ini disebabkan lemahnya daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, dan belum kuatnya jaringan eksportir.
3. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah, dan belum terintegrasinya pasar lokal.
4. Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan jalan raya dan fasilitas umum lainnya. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan kurang tertatanya kawasan pedagang kaki lima.
5. Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari banyaknya pasar swalayan/pasar modern, dan keberadaan pasar tradisional dan toko kelontong yang sudah ada kurang mendapat perlindungan.
6. Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya infrastruktur penunjang yang telah menyebabkan turunnya daya saing produk.
7. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan.
8. Berlakunya AFTA 2010 yang mempengaruhi persaingan produk-produk perdagangan antar Negara.

1.4.4 BIDANG PASAR DAERAH

1. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional.
2. Belum optimalnya tingkat pengelolaan pasar tradisional.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

II.1 RENCANA STRATEGIS DINAS TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sesuai dengan RPJMD Kab. Grobogan Tahun 2016- 2021, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Grobogan yaitu :

1. Visi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan yang terkait dengan visi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”**.

2. Misi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan yang terkait dengan misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu misi ke3 yang mana terdapat isu strategis yang dihadapi disperindag, yaitu **“Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata”**.

II.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah

diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

1. Tujuan

Tujuan yang dirumuskan pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kinerja sektor industri dan perdagangan.

2. Sasaran

Sasaran pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pertumbuhan industri.
- b. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan dengan sasaran. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.1 Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator

	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Menumbuhkembangkan usaha ekonomi kerakyatan	Meningkatnya jumlah dan kapasitas Industri Kecil dan	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

	baik koperasi dan UMKM, industri, maupun perdagangan	Menengah (IKM)	
			Pertumbuhan Industri
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta kinerja sektor perdagangan	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan
			Perkembangan nilai ekspor

II.4 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 mengacu pada Dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2020	TARGET Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kelengkapan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan kepada masyarakat	kualitas sarana dan prasarana aparatur dinas meningkat	90 %	100 %
2	Peningkatan ketrampilan dan kemampuan pegawai didalam pelaksanaan tugas sehari hari dan pelayanan kepada masyarakat	Pegawai yang semakin terampil dan mampu melayani masyarakat dalam tugas sehari-hari	80%	90%
3	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya dukungan operasional/pelaksanaan tata usaha, aktivitas perkantoran dan kinerja kantor	90 %	100 %
4	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan	85%	90%
5	Terciptanya kedisiplinan pegawai dalam berpakaian dinas	Kedisiplinan pegawai dalam berpakaian dinas meningkat	90%	100%

6	Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah	Persentase industri kecil dan menengah	99,97%	99,97%
		Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	0,20%	0,21%
8	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Tingkat Pengaduan Yang ditangani	90%	95%
		Persentase Pasar yang diawasi	16%	16,50%
9	Meningkatnya efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	persentase cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	28%	30%
		Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	62,50%	68%
10	Meningkatnya pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dan Asongan	Persentase lokasi PKL yang tertata	50 %	50 %

II.5 RENCANA ANGGARAN DISPERINDAG TAHUN 2020

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama telah ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan untuk belanja langsung sebesar Rp.7.524.360.650,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribuan Enam Ratus Lima Puluh Rupiah). Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Tabel Pagu Anggaran 2020

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.853.968.400,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	489.808.000,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.600.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.665.000,00
5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	114.975.000,00
6	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	280.915.000,00
7	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.605.443.250,00
8	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	149.986.000,00
Jumlah		7.524.360.650,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan selaku pengembalian amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2020. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan meliputi :

Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja 2020

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN 2019	CAPAIAN TAHUN 2020	PENJELASAN
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	16,5%	13,31%	-
2	Pertumbuhan Industri (%)	1,27%	0,78%	-
3	Cakupan pembinaan unit Usaha IKM (%)	25%	2,22%	-
4	Persentase industri kecil dan menengah (%)	38,4%	99,93%	-
5	Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi	75%	0,59%	-

	produk (%)			
6	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi (%)	47%	62,5%	-
7	Persentase sentra industri yang berkembang (%)	40%	49,12%	-
8	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM (%)	20%	16,70%	-
9	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan (%)	70%	75%	-
10	Perkembangan nilai ekspor (Rp)	Rp.52.529.470.096	Rp. 1.226.949.568429	-
11	Persentase Pasar yang diawasi (%)	100%	100%	-
12	Tingkat pengaduan yang ditangani (%)	100%	90%	-
13	Produk yang bisa diterima pasar internasional (bh)	5 bh	5 bh	-
14	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	19,68%	20,09%	-
15	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal (%)	85%	90%	-
16	Persentase lokasi PKL yang tertata (%)	75%	75%	-

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 meliputi :

a. Urusan Perdagangan

1. Persentase pasar yang memenuhi persyaratan.
2. Perkembangan nilai ekspor.
3. Persentase Pasar yang diawasi.
4. Tingkat pengaduan yang ditangani.
5. Produk yang bisa diterima pasar internasional.
6. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.
7. Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal.
8. Persentase lokasi PKL yang tertata.

b. Urusan Perindustrian

1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB.
2. Pertumbuhan Industri.
3. Cakupan pembinaan unit Usaha IKM.
4. Persentase industri kecil dan menengah.
5. Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk.
6. Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi.
7. Persentase sentra industri yang berkembang.
8. Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM.
9. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Adapun rincian evaluasi capaian indikator kinerja urusan RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 tampak pada tabel evaluasi capaian kinerja indikator urusan RPJMD terlampir.

Pencapaian indikator kinerja sasaran dan atau kegiatan dilakukan dengan menyajikan capaian atas target kinerja setiap sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun rincian capaian indikator kinerja setiap sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tabel Capaian Kegiatan 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET
1	Dipatuhinya UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	Penyelesaian pengaduan konsumen	12 perkara	12 perkara	100%
2	59 toko modern dan 14 pasar daerah	Sosialisasi standar produk / Cetak leaflet	1.800 eksemplar	1.800 eksemplar	100%
3	SPBU dan SPBE	Peralatan kemetrolgion anak timbangan bidur	200 unit	200 unit	100%
4	SPBU, Agen dan pangkalan LPG 3 kg, pelaku usaha	Monitoring SPBU, SPBE dan Pasar daerah	22 SPBU, 2 SPBE dan 14 pasar daerah	22 SPBU, 2 SPBE dan 14 pasar daerah	100%
5	1 Pasar daerah	Terlaksananya sosialisasi pasar daerah	100 orang, 1 hari	100 orang, 1 hari	100%
6	Masyarakat Kabupaten Grobogan	Terlaksananya event pasar rakyat	1 kali	1 kali	100%
7	Pelayanan informasi harga kebutuhan masyarakat	Dokumen infomasi harga Kepokmas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
8	Gedung packaging dan sarana prasarana	Tersedianya sarana prasarana gedung SRG, Dokumen SRG dan STA	30 buah,4 dokumen	30 buah,4 dokumen	100%
9	Dinas Perindag Kabupaten Grobogan	Terlaksananya sosialisasi yang diikuti oleh Gapoktan/Poktan, Dokumentasi video profil perdagangan	6 Gapoktan/Poktan, 1 Dokumen video	6 Gapoktan/Poktan, 1 Dokumen video	100%
10	Pedagang Pasar Daerah	Jumlah pedagang yang dibina, Jumlah Juru Parkir	240 pedagang, 137 juru parkir	240 pedagang, 137 juru parkir	100%
11	Pasar Pagi, Godong, Ketitang, Kuwu, Nglejok	Jumlah Pasar yang mendapat penataan Sapras, Dokumen amdal, Dokumen amdalalin, Dokumen DED Pasar	5 Pasar daerah, 6 Dokumen	5 Pasar daerah, 6 Dokumen	100%
12	Pelaku Usaha Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Acceptmen Motivation Training, jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek perdagangan	70 orang, 3 hari	70 orang, 3 hari	100%
13	Pasar Daerah di Kabupaten Grobogan	Terlaksananya pembangunan / revitalisasi pasar daerah	1 Dokumen perencanaan	1 Dokumen perencanaan	100%

		di Kabupaten Grobogan			
14	Pasar Daerah di Kabupaten Grobogan	Terlaksananya pembangunan lapak darurat dan sosialisasi pedagang pasar umum Tuko	1 Pasar daerah (Pasar Umum Tuko)	1 Pasar daerah (Pasar Umum Tuko)	100%
15	Pedagang Pasar Umum Kuwu	Terlaksananya penunjang pembangunan / revitalisasi pasar daerah / rakyat di Kabupaten Grobogan	1 Lapak Darurat dan DED Pasar Umum Kuwu	1 Lapak Darurat dan DED Pasar Umum Kuwu	100%
16	Pedagang Kakilima	Jumlah rambu-rambu PKL	37 unit	37 unit	100%
17	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan dan 17 Pasar daerah	Jumlah KWH, Jumlah air	146050 KWH, 6100 m3	146050 KWH, 6100 m3	100%
18	Pelayanan administrasi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen pelaporan administrasi keuangan pasar daerah	17 Pasar	17 Pasar	100%
19	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	90 item	90 item	100%
20	Kantor Dinas perindustrian dan perdagangan dan 17 Pasar daerah	Jumlah barang cetakan	39 item	39 item	100%
21	Kantor Dinas perindustrian dan perdagangan dan 17 Pasar daerah	Jumlah suku cadang alat listrik	105 item	105 item	100%
22	Karyawan karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan tabloid	1152 eksp	1152 eksp	100%
23	Karyawan karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	Jumlah makanan dan minuman di kantor perindag	3112 org/jamuan	3112 org/jamuan	100%
24	Rapat / koordinasi / konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat / koordinasi / konsultasi ke luar daerah (perjalanan dinas ke luar daerah, dalam provinsi / luar provinsi)	12 Bulan	12 Bulan	100%
25	Rapat / koordinasi / konsultasi di dalam daerah	Ketersediaan rapat / koordinasi / konsultasi di dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%
26	Penyediaan peralatan kebersihan, bahan pembersih, upah tenaga kebersihan, keamanan dan pengemudi kantor dinas / SRG / dan Pasar Daerah	Jumlah alat kebersihan	27 item	27 item	100%
27	Kendaraan dinas / operasional (mobil / sepeda motor)	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	19 unit	19 unit	100%
28	Pemeliharaan alat alat kantor, komputer PC, Laptop, AC, Mesin ketik, Printer, Pengisian tabung pemadam kebakaran	Jumlah perlatan kantor yang terpelihara	51 unit	51 unit	100%
29	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	Jumlah perlengkapan gedung yang tersedia	10 unit	10 unit	100%

30	Gedung Ir. Dalmadi, Kantor Dinas Perindag	Terlaksananya pemeliharaan gedung	2 Gedung	2 Gedung	100%
31	Karyawan karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	Jumlah ketersediaan bimbingan teknis non formal	12 Bulan	12 Bulan	100%
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
33	Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	Jumlah dokumen atau pelaporan yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
34	KUB	Terlaksananya pembinaan dan monitoring KUB	20 Kelompok	20 Kelompok	100%
35	IKM Kabupaten Grobogan	Terselenggaranya pameran	1 kali	1 kali	100%
36	KUB / IKM	Meningkatkan pengetahuan IKM perkembangan industri kecil dan menengah (rokok), meningkatkan pengetahuan IKM perkembangan industri kecil dan menengah (makanan olahan)	(5 orang, 3 hari), (23 orang, 1 hari)	(5 orang, 3 hari), (23 orang, 1 hari)	100%
37	Perajin mebel KUB Mulia Abadi Desa Tirem Kecamatan Brati	Jumlah sentra IKM yang mendapatkan sarana revitalisasi sentra IKM	1 KUB	1 KUB	100%

III.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi kinerja setiap capaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan diuraikan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Penyelesaian pengaduan konsumen sesuai UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dicapai melalui program “Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan” dengan Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 13.458.750,-
2. Terlaksananya Sosialisasi standar produk (59 toko modern dan 14 pasar daerah) di 19 Kecamatan. Dicapai melalui program “Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan” dengan Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 12.600.000,-
3. Terlaksananya pengadaan peralatan kemetrolgion anak timbangan bidur (200 unit). Dicapai melalui program “Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan” dengan Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgion Daerah. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 78.810.000,-

4. Terlaksananya Monitoring SPBU, SPBE dan Pasar daerah (22 SPBU, 2 SPBE dan 14 pasar daerah). Dicapai melalui program “Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan” dengan Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pengamanan Perdagangan. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 9.611.250,-

Capaian sasaran tahun 2019 dan 2020 tampak sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				
	Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	100%	Rp. 38.101.250,-	100%	Rp. 13.458.750,-
	Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah	100%	Rp. 79.580.000,-	100%	Rp. 78.810.000,-
	Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	100%	Rp. 23.330.000,-	100%	Rp. 12.600.000,-
	Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pengamanan Perdagangan	100%	Rp. 19.661.250,-	100%	Rp. 9.611.250,-

5. Terlaksananya sosialisasi pasar daerah (1 pasar daerah, 100 orang, 1 hari). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri” dengan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 125.952.000,-
6. Terlaksananya event pasar rakyat di Kabupaten Grobogan. Dicapai melalui program “Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri” dengan Kegiatan Fasilitas Pemasaran Produk Dagang. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 197.512.000,-
7. Tersedianya data dokumen informasi harga dan kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri” dengan Kegiatan Pelayanan Informasi Harga Dan Kebutuhan Pokok Masyarakat. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 24.737.500,-
8. Tersedianya sarana prasarana gedung SRG, Dokumen SRG dan STA. Dicapai melalui program “Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri”

- dengan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Produk Dagang. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 398.065.000,-
9. Terlaksananya sosialisasi yang diikuti oleh Gapoktan/Poktan dan pembuatan dokumentasi profil perdagangan (6 Gapoktan/Poktan, 1 Dokumen video). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri” dengan Kegiatan Fasilitas Pendataan Produk Dagang. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 66.776.750,-
 10. Terlaksananya pembinaan pedagang di lingkungan Pasar Daerah (240 pedagang). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri” dengan Kegiatan Pembinaan Pedagang Pasar. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 413.353.000,-
 11. Terlaksananya penataan sarana dan prasarana pasar daerah, dokumen amdal, dokumen amdalalin, dokumen DED Pasar (5 Pasar Daerah, 6 dokumen). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri” dengan Kegiatan Penataan Sarana Prasarana Pasar Daerah. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 1.715.765.000,-
 12. Terlaksananya pelatihan / bimtek perdagangan bagi pelaku usaha di Kabupaten Grobogan (70 orang, 3 hari). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri” dengan Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 115.065.000,-
 13. Terlaksananya Pembuatan DED Pasar Umum Tuko (1 Dokumen perencanaan). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri” dengan Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Daerah (DAK Fisik). Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 46.635.000,-
 14. Terlaksananya pembangunan lapak darurat dan sosialisasi pedagang pasar umum Tuko. Dicapai melalui program “Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri” dengan Kegiatan Penunangan Pembangunan / Revitalisasi Pasar Umum Tuko. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 162.711.370,-
 15. Terlaksananya penunangan pembangunan / revitalisasi pasar daerah / rakyat di Kabupaten Grobogan (1 Lapak Darurat dan DED Pasar Umum Kuwu). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri” dengan Kegiatan Penunangan Dana Tugas

Pembantuan(TP)Kementrian Perdagangan. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 311.260.000,-

Capaian sasaran tahun 2019 dan 2020 tampak sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri	100%	Rp. 199.775.000,-	100%	Rp. 125.952.000,-
	Fasilitasi Pemasaran Produk Dagang	100%	Rp. 241.260.000,-	100%	Rp. 197.512.000,-
	Pelayanan Informasi Harga Dan Kebutuhan Pokok Masyarakat	100%	Rp. 10.711.250,-	100%	Rp. 24.737.500,-
	Pembangunan Sarana Prasarana Produk Dagang	100%	Rp. 269.862.000,-	100%	Rp. 398.065.000,-
	Fasilitasi Pendataan Produk Dagang	100%	Rp. 107.056.250,-	100%	Rp. 66.776.750,-
	Pembinaan Pedagang Pasar	100%	Rp. 40.000.000,-	100%	Rp. 413.353.000,-
	Penataan Sarana Prasarana Pasar Daerah	100%	Rp. 2.451.645.500,-	100%	Rp. 1.715.765.000,-
	Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	0%	-	100%	Rp. 115.065.000,-
	Pembangunan / Revitalisasi Pasar Daerah / Rakyat (DAK FISIK)	100%	Rp. 2.917.618.250,-	100%	Rp. 46.635.000,-
	Penunangan Pembangunan / Revitalisasi Pasar Umum Tuko	0%	-	100%	Rp. 162.711.370,-
	Penunangan Dana Tugas Pembantuan(TP)Kementrian Perdagangan	0%	-	100%	Rp. 311.260.000,-

16. Tersedianya rambu - rambu PKL (37 unit). Dicapai melalui program “Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan” dengan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Dagang Pedagang Kaki Lima Dan Asongan. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 147.714.000,-

Capaian sasaran tahun 2019 dan 2020 tampak sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN
1	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan				
	Pengadaan Sarana Prasarana Dagang Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	0%	-	100%	Rp. 147.714.000,-

17. Terpenuhinya kebutuhan telepon, internet, air dan listrik kantor dinas dan pasar daerah (146050 KWH, 6100 m3, 12 bulan). Dicapai melalui program “Program Pelayanan Administrasi Perkantoran” dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 244.042.990,-
18. Terlaksananya penyelesaian administrasi / dokumen pelaporan administrasi keuangan pasar daerah (17 Pasar daerah, 12 Bulan). Dicapai melalui program “Program Pelayanan Administrasi Perkantoran” dengan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 22.392.300,-
19. Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (90 item). Dicapai melalui program “Program Pelayanan Administrasi Perkantoran” dengan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 102.292.000,-
20. Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan / foto copy (39 item). Dicapai melalui program “Program Pelayanan Administrasi Perkantoran” dengan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 286.262.625,-
21. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan kantor dan pasar daerah (105 item). Dicapai melalui program “Program Pelayanan Administrasi Perkantoran” dengan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 9.840.000,-
22. Tersedianya bahan bacaan koran/Surat kabar dan tabloid sebanyak (1152 expemlar surat kabar). Dicapai melalui program “Program Pelayanan Administrasi Perkantoran” dengan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

- Peraturan Perundang-Undangan. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 6.375.000,-
23. Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman di kantor dinas perindag (3112 org/jamuan). Dicapai melalui program “Program Pelayanan Administrasi Perkantoran” dengan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 47.396.000,-
24. Terlaksananya rapat/ koordinasi/ konsultasi ke luar daerah (perjalanan dinas ke luar daerah, dalam provinsi / luar provinsi) (12 Bulan). Dicapai melalui program “Program Pelayanan Administrasi Perkantoran” dengan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 309.504.665,-
25. Terlaksananya rapat/ koordinasi di dalam daerah (12 Bulan). Dicapai melalui program “Program Pelayanan Administrasi Perkantoran” dengan Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 213.639.250,-
26. Terlaksananya pengelolaan kebersihan, keamanan dan transportasi dan tersedianya peralatan kebersihan (27 item, 12 Bulan). Dicapai melalui program “Program Pelayanan Administrasi Perkantoran” dengan Kegiatan Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 1.525.489.000,-

Capaian sasaran tahun 2019 dan 2020 tampak sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Rp. 305.703.336,-	100%	Rp. 244.042.990,-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	Rp. 25.973.000,-	100%	Rp. 22.392.300,-
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	Rp. 117.900.000,-	100%	Rp. 102.292.000,-
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Rp. 273.467.860,-	100%	Rp. 286.262.625,-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Rp. 14.938.500,-	100%	Rp. 9.840.000,-
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan	100%	Rp. 9.000.000,-	100%	Rp. 6.375.000,-

	Peraturan Perundang Undangan				
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	Rp. 101.755.000,-	100%	Rp. 47.396.000,-
	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%	Rp. 551.584.430,-	100%	Rp. 309.504.665,-
	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah	100%	Rp. 344.231.611,-	100%	Rp. 213.639.250,-
	Kegiatan Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi	100%	Rp. 1.492.855.750,-	100%	Rp. 1.525.489.000,-

27. Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor (1 unit gerobak sampah, 9 unit alat semprot disinfektan). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” dengan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 10.976.000,-
28. Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor (2 gedung : Gedung kantor dinas perindag dan gedung Ir. Dalmadi). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” dengan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 398.026.000,-
29. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional (19 Kendaraan). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” dengan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 53.881.155,-
30. Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan gedung kantor (51 unit, 12 Bulan). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” dengan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 19.917.100,-

Capaian sasaran tahun 2019 dan 2020 tampak sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Rp. 211.972.700,-	100%	Rp. 10.976.000,-

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	Rp. 29.581.000,-	100%	Rp. 398.026.000,-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	Rp. 64.307.075,-	100%	Rp. 53.881.155,-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	Rp. 39.735.790,-	100%	Rp. 19.917.100,-

31. Tercukupinya pendidikan dan pelatihan non formal (12 Bulan). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur” dengan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 4.600.000,-

Capaian sasaran tahun 2019 dan 2020 tampak sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	100%	Rp. 4.500.000,-	100%	Rp. 4.600.000,-

32. Terlaksananya penyusunan pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD (7 Dokumen). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan” dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 16.724.250,-

33. Tersusunnya pelaporan pengelolaan aset daerah (5 dokumen). Dicapai melalui program “Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan” dengan Kegiatan Pengelolaan Aset. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 7.652.000,-

Capaian sasaran tahun 2019 dan 2020 tampak sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	100%	Rp. 24.121.250,-	100%	Rp. 16.724.250,-

Kinerja SKPD				
Pengelolaan Aset	100%	Rp. 9.303.000,-	100%	Rp. 7.652.000,-

34. Terlaksananya pembinaan dan monitoring kelompok usaha bersama / IKM Kabupaten Grobogan (20 kelompok). Dicapai melalui program “Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah” dengan Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 25.375.000,-
35. Terselenggaranya pameran IKM Kabupaten Grobogan (1 kali). Dicapai melalui program “Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah” dengan Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Hasil Industri Kecil Dan Menengah. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 31.205.000,-
36. Terlaksananya studi terap IKM guna meningkatkan pengetahuan IKM tentang industri rokok dan industri olahan makanan. Dicapai melalui program “Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah” dengan Kegiatan Study Terap Industri Kecil dan Menengah. Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 18.950.000,-
37. Terlaksananya revitalisasi sentra IKM (1 KUB). Dicapai melalui program “Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah” dengan Kegiatan Revitalisasi Sentra IKM (DAK Fisik). Capaian realisasi kegiatan 100%, realisasi keuangan Rp. 198.000.000,-

Capaian sasaran tahun 2019 dan 2020 tampak sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	100%	Rp. 52.300.000,-	100%	Rp. 25.375.000,-
	Fasilitasi Pemasaran Hasil Industri Kecil Dan Menengah	-	-	100%	Rp. 31.205.000,-
	Study Terap Industri Kecil dan Menengah	-	-	100%	Rp. 18.950.000,-
	Revitalisasi Sentra IKM (DAK Fisik)	-	-	100%	Rp. 198.000.000,-

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

1. Urusan Perdagangan

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Sebagian besar konsumen/ pelaku usaha belum memahami UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.	Melakukan sosialisasi UU no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada konsumen/ pelaku usaha.
2	Sebagian konsumen/ pelaku usaha belum menyadari akan pentingnya tera dan tera ulang.	Melakukan sosialisasi UU no.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal kepada konsumen/ pelaku usaha.
3	Masih adanya barang barang di toko, pasar dan toko modern yang tidak sesuai dengan ketentuan (pelabelan, standart kadaluwarso).	Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan/ atau jasa ditoko, pasar dan toko modern.
4	Belum optimalnya peralatan mesin drayer gudang SRG.	Meningkatkan pemeliharaan peralatan mesin drayer sehingga bisa dapat difungsikan, terutama pada saat musim hujan sehingga padi bisa dapat dikeringkan tanpa tergantung cuaca.
5	Fluktuasi harga yang terjadi di masyarakat terutama pada saat menghadapi Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.	Meningkatkan monitoring dan laporan sehingga dapat diketahui perkembangannya untuk dapat dipakai dasar mengambil kebijakan bagi stake holder/ pimpinan.
6	Pedagang belum memahami hak dan kewajiban berkaitan dengan ijin pemakaian tempat .	Melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif ke pedagang dan mengoptimalkan personil yang ada di UPTD Pasar Daerah.
7	Tempat relokasi yang belum cukup untuk menampung jumlah Pedagang kaki lima.	Melakukan pembangunan bertahap lokasi tempat pusat kuliner untuk menampung pada pedagang kaki lima.

2. Urusan Perindustrian

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Penataan dan penugasan Tenaga Harian Lepas (THL) di Pasar Daerah belum difungsikan secara maksimal sesuai dengan tugasnya.	Validasi data Tenaga Harian Lepas (THL) di Pasar Daerah agar bisa bekerja secara maksimal sehingga akan berdampak efisiensi anggaran.

2	Terbatasnya personil di Pasar Daerah sebagai bendahara penerimaan pembantu.	Bendahara penerimaan pembantu pasar daerah agar bekerja secara maksimal, disiplin dan tertib dalam pengadministrasiannya sehingga target pendapatan bisa melebihi target.
3	Adanya aset yang sudah berumur, sehingga tidak bisa digunakan dengan baik.	Pengadministrasian dan pemanfaatan aset agar lebih maksimal dan untuk aset yang tidak bisa dimanfaatkan agar diusulkan penghapusan.
4	Rendahnya jiwa entrepreneur bagi pengrajin (IKM).	Meningkatkan pembinaan yang berkelanjutan dalam mengembangkan jiwa entrepreneur.
5	Kurangnya kemampuan dalam mengembangkan mutu produk dan diversifikasi produk IKM.	Meningkatkan pembinaan, pelatihan dan magang kerja di luar daerah sehingga IKM lebih inovatif produk yang dihasilkan.
6	Kurangnya ketrampilan dalam membuat membuat design khas Grobogan.	Melakukan promosi baik secara langsung pada event event pameran maupun dengan media sosial untuk mengalag jaringan pemasaran.
7	Belum adanya jaringan pemasaran produk batik.	Meningkatkan promosi produk baik secara elektronik maupun media cetak sehingga dapat dikenal kalangan banyak.

III.3 REALISASI ANGGARAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.524.360.650,- Teralisasi sebesar Rp. 7.392.566.955,- atau mencapai 98,25 %, yang dialokasikan pada 8 program dan 37 kegiatan.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN 2020	
		ANGGARAN KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.693.385.000	1.421.270.500
1	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	13.665.000	13.458.750
2	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	12.600.000	12.600.000
3	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	78.810.000	78.810.000

4	Fasilitasi Kegiatan Pengamanan Perdagangan	9.900.000	9.611.250
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3.605.443.250	3.577.832.620
5	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri	125.952.000	125.952.000
6	Fasilitasi Pemasaran Produk Dagang	197.512.000	197.512.000
7	Pelayanan Informasi Harga Dan Kebutuhan Pokok Masyarakat	25.000.000	24.737.500
8	Pembangunan Sarana Prasarana Produk Dagang	406.120.000	398.065.000
9	Fasilitasi Pendataan Produk Dagang	67.500.000	66.776.750
10	Pembinaan Pedagang Pasar	413.353.000	413.353.000
11	Penataan Sarana Prasarana Pasar Daerah	1.730.000.000	1.715.765.000
12	Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	115.065.000	115.065.000
13	Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Daerah (DAK Fisik)	46.635.000	46.635.000
14	Penunangan Pembangunan / Revitalisasi Pasar Umum Tuko	163.306.250	162.711.370
15	Penunangan Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementrian Perdagangan	315.000.000	311.260.000
	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	149.986.000	147.714.000
16	Pengadaan Sarana Prasarana Dagang Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	149.986.000	147.714.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.853.968.400	2.767.233.830
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.480.000	244.042.990
18	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.970.000	22.392.300
19	Penyediaan Alat Tulis Kantor	102.292.000	102.292.000
20	Penyediaan Barang Cetak dan	298.327.400	286.262.625

	Penggandaan		
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.010.000	9.840.000
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.375.000	6.375.000
23	Penyediaan Makanan dan Minuman	47.396.000	47.396.000
24	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	309.646.000	309.504.665
25	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	213.650.000	213.639.250
26	Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi	1.548.822.000	1.525.489.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	489.808.000	482.800.255
27	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	11.183.000	10.976.000
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	400.000.000	398.026.000
29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	58.625.000	53.881.155
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20.000.000	19.917.100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.600.000	4.600.000
31	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	4.600.000	4.600.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.665.000	24.376.250
32	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.013.000	16.724.250
33	Pengelolaan Aset	7.652.000	7.652.000
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	280.915.000	273.530.000
34	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	28.075.000	25.375.000
35	Fasilitasi Pemasaran Hasil	32.340.000	31.205.000

	Industri Kecil Dan Menengah		
36	Study Terap Industri Kecil dan Menengah	20.500.000	18.950.000
37	Revitalisasi Sentra IKM (DAK Fisik)	200.000.000	198.000.000

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan disusun berdasarkan capaian kinerja seluruh kegiatan APBD yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, setiap tahunnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2020 ini merupakan laporan tahun kelima dari tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategik OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021.

Pada tahun 2020 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan masih terdapat target kinerja yang belum sepenuhnya tercapai. Belum tercapainya sasaran tersebut tentunya perlu dikaji dan dianalisa agar kita dapat melakukan perbaikan – perbaikan di masa mendatang seperti terurai pada Bab III di atas.

Di masa mendatang dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat lebih mempertajam sasaran dari tujuan yang hendak dicapai. Juga lebih menguatkan adanya hubungan antara Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

LAMPIRAN